

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam mengembangkan riset tentang praktik *intermedia agenda-setting*, peneliti merujuk kepada sejumlah riset terdahulu yang membahas hal yang relevan seperti analisis isi, *agenda-setting*, tema politik, *Twitter* dan penelitian media sosial. Selain itu, penelitian ini ingin melihat perkembangan teori *agenda-setting* dari bentuk media lama ke bentuk media daring dan relevansinya dengan konsep intermedia agenda setting.

Riset terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Intermedia Agenda Setting in a Policy Reform Debate* yang dibuat oleh Linda Van Den Heijkant, Martine Van Selm, Iina Hellsten, dan Rens Vliegthart dari University of Amsterdam, Belanda (2019). Penelitian ini menginvestigasi *agenda-setting* antara media berita tradisional dan media sosial dalam debat kebijakan. Dalam penelitian ini si peneliti menarik kata-kata kunci yang terkait dengan suatu topik (dalam hal ini tentang kebijakan).

Riset terdahulu ini menemukan pihak mana yang menentukan agenda dalam area media. Temuan dari riset ini adalah media sosial memiliki kekuatan untuk menentukan agenda dalam debat publik, namun media tradisional tetap memiliki kekuatan paling besar dalam menetapkan agenda.

Riset Heijkant dan kawan-kawan juga menjadi acuan penelitian ini mengenai *intermedia agenda-setting*. *Intermedia agenda-setting* merupakan hasil dari perluasan dari fokus utama *agenda-setting*. Konsep dari *intermedia agenda-setting* berfokus pada pengaruh isu penting dalam area media.

Penelitian ini ingin melanjutkan riset terdahulu karena penelitian sebelumnya melihat dari sudut pandang media tradisional, sedangkan penelitian ini ingin melihat dari sudut pandang media daring. Fokus penelitian ini tidak hanya dalam medianya namun juga ingin berfokus ke *Twitter* sebagai khalayak. *Twitter* digunakan karena kemudahannya mengakses data dan mengolahnya. Riset ini juga ingin mencoba apakah *Twitter* dapat digunakan sebagai platform pembanding jika ingin berbicara mengenai *agenda-setting*.

Riset terdahulu selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset dari oleh Axel Bruns dan Jean Burges yang berjudul *Research News Discussion on Twitter: New Methodologies* yang terbit pada tahun 2012. Temuan dari riset ini adalah pengguna *Twitter* akan bereaksi di saat-saat isu atau peristiwa penting terjadi dan layak diberitakan. Pengguna *Twitter* akan bereaksi terhadap suatu isu atau peristiwa secara sendirinya yang mereka anggap relevan terhadap diri mereka sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa contoh peristiwa atau isu yang dijadikan subjek riset tersebut. Dari isu atau peristiwa yang ada terdapat grafik yang menjelaskan bahwa pengguna *Twitter* hanya akan bereaksi dalam jangka waktu yang pendek.

Penelitian ini ingin mengaplikasikan teknik analisis data yang digunakan dalam riset Bruns dan Burges, yang dalam hal ini merupakan *network analysis*, yaitu dengan

mencari relasi antara kata kunci dan tagar yang digunakan di *Twitter* terhadap kata-kata yang sering muncul nantinya.

Perbedaan antara penelitian ini dengan riset Bruns dan Burges adalah pada penelitian ini, data dari *Twitter* akan menjadi media platform pembanding terhadap media daring. Akan dicari relasi antara media daring dan *Twitter* untuk melihat apakah praktik *intermedia agenda-setting* dapat terjadi antara keduanya. Penelitian ini juga ingin melihat kata-kata yang sering muncul bersamaan dengan suatu tagar atau kata kunci tertentu yang tidak ada dalam riset Bruns dan Burges. Dari kata-kata itu lah dapat dilihat relasi antara media daring dengan *Twitter*.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Media dan Politik

Media merupakan pelengkap dalam kehidupan politik di negara demokrasi seperti Indonesia. Fungsi media tidak hanya untuk menyebarkan informasi ke masyarakat namun juga dapat menjadi wadah untuk mengkomunikasikan sesuatu. Media memiliki kekuatan komunikatif dan peran fundamental dalam fungsinya di politik dan kehidupan masyarakat (Craig, 2007, p. 22).

Media tidak hanya menjadi pelengkap dalam kehidupan politik namun juga memiliki fungsi *watchdog*. Media, meskipun berfungsi untuk memproduksi pemahaman dominan tentang suatu isu dan peristiwa, tetap

membuat pertanyaan dan kritik untuk dikonsumsi oleh masyarakat (Craig, 2007, p. 19). Di negara demokrasi seperti Indonesia media dapat memberikan informasi apabila ada sesuatu yang tidak beres dalam pemerintahan.

Relasi dari media dan politik dapat dilihat dari munculnya berita politik yang muncul di media cetak ataupun medium lainnya. Berita politik yang penting merupakan pemberitaan mengenai pemerintah (Craig, 2007, p. 82). Berita politik hadir di berbagai medium yang sebuah media miliki. Salah satu medium yang menjadi banyak digunakan dalam penyebaran berita politik adalah media daring.

Saat ini internet membuat media dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dengan kehadiran internet, media pun dapat menjadi lebih fleksibel dalam pemberitaan. Menurut Craig (2007) media berita di internet (atau media daring) memiliki keuntungan dalam peliputan karena lebih instan. Tidak hanya lebih cepat namun media daring juga dapat menghadirkan informasi dengan informasi yang lebih komprehensif (p.88).

Media dapat menyuntik informasi kepada masyarakat tentang isu-isu tertentu, termasuk isu politik. Dalam hal ini media dapat menyediakan informasi seputar isu politik dalam bentuk berita politik, yang mana dapat memengaruhi bagaimana masyarakat 'melihat' proses politik yang terjadi. Lang dan Lang (1966) menjelaskan bahwa:

Media massa memaksa perhatian pada isu-isu tertentu. Mereka membangun citra publik tokoh-tokoh politik. Mereka terus-menerus menghadirkan objek

yang menunjukkan apa yang harus dipikirkan, diketahui, dan dipikirkan oleh individu dalam massa (p. 106).

Berita politik tidak hanya ada dalam media daring atau media tradisional. Media sosial turut menjadi sumber dalam menjadi berita atau informasi politik. Dalam penelitiannya, Bode (2012) menemukan bahwa paparan informasi politik banyak justru ditemukan di media sosial, padahal sebelumnya yang umum terjadi adalah masyarakat memperoleh informasi politik dari media daring dan media tradisional (seperti dikutip dalam Bode, 2015, p. 2).

Dalam proses pembentukan berita politik, relasi antara jurnalis dan tokoh politik juga perlu digarisbawahi. Berita politik pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi antara jurnalis dan tokoh politik, di mana jurnalisme yang juga berperan sebagai 'institusi politik' yang tidak resmi, namun keduanya saling tergantung satu sama lain (Usher, Holcomb, & Littman 2018, p. 3). Selain itu, media juga berperan sebagai institusi yang menyebarkan informasi atau isu politik yang sedang ramai dibicarakan oleh tokoh-tokoh politik.

Konsep media dan politik digunakan dalam penelitian ini karena ingin menjelaskan korelasi antara media dan politik yang terjadi secara komperhensif. Penjelasan konsep media dan politik ini juga membantu dalam menentukan berita yang dipilih untuk menjadi sumber analisis isi berita. Konsep ini juga digunakan dalam pemilihan kata kunci untuk mencari data di media sosial karena isu yang dibicarakan merupakan isu politik.

2.2.2 Media Sosial, *Network Society* dan Perbincangan Politik

Network society (masyarakat jaringan) menurut van Dijk (2012, p. 20) dapat diartikan sebagai formasi sosial dengan infrastruktur jaringan sosial dan media yang menghubungkan individu, kelompok/organisasi dan masyarakat, di mana semakin lama, jaringan ini menghubungkan semua kalangan masyarakat (individu, kelompok, organisasi). Menurutnya lagi, pada level individu penggunaan jaringan telah mendominasi kehidupan khalayak. Selain itu, biasanya dalam masyarakat jaringan, waktu yang dihabiskan untuk mengakses jaringan siaran mulai dari telepon dan internet antar lima hingga tujuh jam sehari untuk golongan masyarakat maju (van Dijk, 2012, p. 1).

Khalayak tidak hanya mengonsumsi berita melalui media *mainstream* tapi juga melalui media sosial. Hal ini dapat terjadi karena banyak media daring yang juga memiliki akun di media sosial. Dari akun-akun itulah perusahaan media dapat menyebar berita, siaran televisi atau bentuk berita yang lain.

Media sosial menciptakan ruang yang menjadi penengah dan memperluas percakapan yang melebihi interaksi tatap muka, namun di sisi lain media sosial tidak dapat diakses secara universal oleh seluruh manusia (Tierney, 2013, p. 13). Media sosial juga menyediakan outlet untuk mengekspresikan sikap politik yang seharusnya memiliki dampak paling besar dalam masyarakat yang mana kebebasan berekspresi dibatasi (Barnidge, Huber, Zuniga, & Liu, 2018, p. 166).

Media sosial juga dapat menjadi tempat untuk melihat respons publik terhadap suatu masalah atau kebijakan. Terdapat proposisi teoritis dalam hal ini yaitu: (1) respons publik terhadap suatu kebijakan hanya membutuhkan pengetahuan dasar atas suatu kebijakan atau perubahannya, (2) informasi atas pengetahuan dasar ini sudah tersedia dalam konten media, dan (3) publik dapat mengenali dan menanggapi informasi dari media (Neuner, Soroka, & Wlezien, 2019, p. 3).

Media sosial sukses beradaptasi dalam menggapai dan menyediakan ruang diskusi bagi masyarakat serta menjadi wadah penyebaran informasi (Stieglitz & Dang-Xuan, 2012, p. 3). Hal seperti ini lah yang terjadi di *Twitter*, di mana khalayak tidak hanya mendapatkan informasi tetapi juga bisa menyebarkan informasi mengenai politik—bahkan mampu membentuk masyarakat jaringan sebagaimana yang dimaksud oleh van Dijk sebelumnya. Sehingga diharapkan ada proses konsumsi yang aktif dari masyarakat terkait dengan informasi politik tersebut.

2.2.3 Agenda-setting Theory

Teori *agenda setting* pada mulanya digagas pada tahun 1972 oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Maxwell McCombs dan Donald Shaw percaya bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer beberapa materi dari agenda berita mereka ke agenda publik. Mereka juga mengatakan

jika media menganggap suatu hal penting, maka masyarakat juga akan menganggap hal itu penting (seperti dikutip dalam Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2015, p. 375).

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, *agenda setting* terbentuk atas peran dari dua agenda, yaitu ‘agenda media’ (yang kemudian memengaruhi) dan ‘agenda publik’. Agenda media sendiri memiliki pengertian dasar sebagai pola peliputan berita di media cetak dan penyiaran yang diukur berdasarkan keunggulan dan panjang suatu cerita (Griffin et al., 2015, p. 376). Jadi dapat dikatakan agenda media merupakan sesuatu atau isu yang dianggap penting oleh media yang nantinya diberitakan kepada publik.

Makna dari agenda publik adalah pengertian isu publik yang sangat penting, diukur dari survey opini publik (Griffin et al., 2015, p. 377). Agenda publik merupakan isu yang dianggap penting oleh publik itu sendiri. Agenda publik bisa hasil pembentukan dari publik itu sendiri atau merupakan transfer isu penting dari agenda media.

McCombs dan Donald Shaw menyebutkan bahwa ada bukti dimana penyunting dan penyiar memainkan bagian penting dalam membentuk realitas sosial masyarakat. Media massa mungkin tidak berhasil dalam memberitahu apa yang harus dipikirkan, tetapi mereka secara mengejutkan berhasil dalam memberitahu kita tentang apa yang harus kita pikirkan (seperti dikutip dalam Littlejohn dan Foss, 2009b, p. 415-416).

Terdapat dua *level* pada teori *agenda setting* yaitu *first-level agenda-setting* dan *second-level agenda-setting*. Definisi *first-level agenda-setting* menurut Coleman, McCombs, Shaw dan Weaver (2009) dapat didefinisikan dalam pengertian berikut ini:

Agenda-setting adalah proses media massa memberitakan beberapa isu secara berkala dan jelas dengan hasil masyarakat menganggap isu-isu tersebut lebih penting dari pada yang lain. (p. 147).

Second-level agenda-setting menurut Coleman dan kawan-kawan (2009) menjelaskan transfer arti-penting untuk berbagai masalah dan banyak objek lainnya seperti tokoh politik (p. 147). Dengan kata lain *second-level agenda-setting* berfokus pada atribut, karakteristik dan properti dari sebuah objek yang mendeskripsikan objek tersebut dan tema dari sebuah peliputan (Cheng, 2014, p. 9).

Agenda-setting memiliki relasi dengan kasus politik yang terjadi. Teori ini dihubungkan dalam isu politik seputar kebijakan atau bahkan hukum yang baru karena teori ini merupakan hasil dari relasi antara agenda media, agenda publik, agenda kebijakan dan indikator di dunia nyata. Agenda kebijakan dapat diukur dengan tindakan seperti pengenalan undang-undang tentang sesuatu, alokasi anggaran dan rentang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu masalah (Dearing & Rogers, 1996, p. 18).

Penelitian ini menggunakan *agenda-setting* sebagai acuan dasar karena ingin melihat bagaimana sebuah agenda dapat terbentuk entah itu di media

massa atau di media sosial (khalayak). Penelitian ini mengembangkan *agenda-setting* menjadi *intermedia agenda-setting* yang fokusnya adalah bagaimana konten dari satu medium dapat mempengaruhi konten dari medium yang lain (Heijkant, Selm, Hellsten, & Vliegenthart, 2019, p. 3).

2.2.4 Intermedia Agenda-setting

Agenda-setting menjadi titik utama dalam *intermedia agenda-setting*, beberapa peneliti telah berfokus untuk memahami bagaimana agenda media dibentuk (Heijkant, Selm, Hellsten, & Vliegenthart, 2019, p. 1892). Dengan memperluas fokus dari *agenda-setting*, peneliti telah membuat gagasan untuk *intermedia agenda-setting* yang fokusnya adalah bagaimana konten dari satu medium dapat memengaruhi konten dari platform media yang lain (Heijkant et al., 2019, p. 1892).

Menurut Heijkant dan kawan-kawan (2019), *intermedia agenda-setting* adalah upaya untuk menjelaskan tentang bagaimana relasi proses *agenda setting* dari satu medium ke medium yang lain (p. 1892). Menurut mereka, dengan cara yang sama seperti media menentukan isu penting di pikiran publik, satu media juga dianggap dapat memengaruhi apa yang dianggap penting oleh media lain. Mereka menambahkan, konsep dari *intermedia agenda-setting* berfokus pada pengaruh atas isu yang penting di lingkungan media.

Praktik *intermedia agenda-setting* antar tradisional sudah pernah terjadi dalam penelitian Protes dan McCombs. Protes dan McCombs (1991) menemukan bahwa surat kabar elit dapat memengaruhi agenda dari surat kabar lokal, begitu juga dengan televisi lokal (seperti dikutip dalam Sweetser, Golan, & Wanta, 2008, p. 199). Golan (2006) menemukan bukti yang lebih jauh untuk dengan mengidentifikasi *intermedia agenda-setting* melalui pengaruh dari *New York Times* atas agenda berita internasional dari tiga siaran berita malam Amerika yang terkemuka (seperti dikutip dalam Sweetser, Golan, & Wanta, 2008, p. 199).

Tidak hanya media tradisional yang dapat memberikan pengaruh ke platform media lain namun internet pun juga dapat memberikan pengaruh ke media lain. Praktik *intermedia agenda-setting* juga terjadi pada media dalam jaringan (*networked media*).

Penggunaan konsep *intermedia agenda-setting* dalam penelitian ini adalah untuk melihat adakah pengaruh dari media daring kepada media sosial dan juga sebaliknya. Konsep ini digunakan untuk melihat meskipun terdapat relasi antara media daring dengan khalayak pada media sosial, pasti akan ada salah satu yang memberi pengaruh terlebih dahulu secara tidak langsung.

Tidak hanya pengaruh antara media dan khalayak yang dapat dilihat dari sudut pandang *intermedia agenda-setting*. Media dengan platform yang sama juga dapat saling memberikan pengaruh dalam hal pemberitaan tentang suatu kasus.

Intermedia agenda-setting menjadi konsep yang digunakan dalam meneliti kasus perbandingan/relasi agenda media pada media daring dan media sosial karena pada dasarnya konsep tersebut menjelaskan tentang relasi proses *agenda-setting* dari satu medium ke medium yang lainnya. Konsep ini menjadi relevan karena berfokus pada suatu konten atau isu tertentu di suatu media dapat memengaruhi konten atau isu di media yang lain.

2.3 Alur Penelitian

Bagan 1.1 Alur Penelitian

